

FUNGSI PENGENDALIAN PENERIMA PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KECAMATAN KOTA TIMUR

Yanti Aneta

Universitas Negeri Gorontalo

yanti_aneta@yahoo.co.id

ABSTRACT: This study aims to find out how the control function of livable housing programs recipients in Kota Timur subdistrict. This researcher uses a qualitative approach. Data collection procedures through observation, interviews and documentation. Data analysis used data reduction analysis, data display and conclusion drawing. The results of the research on the control function of livable housing programs recipients in Kota Timur Subdistrict showed that, 1) Aspects of setting standards and methods are in accordance with the General Criteria set by BAPEMAS, but there are certain policies taken by village and subdistrict officials that are adjusted to the conditions in the field, which is usually called a special condition; 2) The aspect of performance measurement shows that the village officials, subdistrict officials have carried out performance measurements based on the rules that have been set; 3) Aspects of Retrieval Corrective Action shows that the parties concerned have coordinated in order to carry out improvements both in the process of planning the determination of livable housing programs recipients and the process of implementing a livable housing program. Research suggestions are related parties consisting of a village, subdistrict, and housing officials and the Gorontalo city settlement area to further intensify coordination and intensive evaluation in terms of determining the recipient community of livable housing programs to be accepted by those who really have the right to receive this program.

Keywords: Control Function, Livable House Program

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pengendalian penerima program rumah layak huni di Kecamatan Kota Timur. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian fungsi pengendalian penerima program rumah layak huni di Kecamatan Kota Timur menunjukkan bahwa, 1) Aspek penetapan standar dan metode sudah sesuai dengan Kriteria Umum yang di tentukan oleh BAPEMAS, tetapi ada kebijakan tertentu yang di ambil oleh aparat Kelurahan dan Kecamatan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, yang biasanya dinamakan kondisi khusus; 2) Aspek pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pihak aparat kelurahan, aparat kecamatan sudah melaksanakan pengukuran kinerja berdasarkan aturan yang telah ditetapkan; 3) Aspek Pengambilan Tindakan Perbaikan menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait sudah melakukan koordinasi dalam rangka melaksanakan perbaikan baik dalam proses rencana penetapan penerima program rumah layak huni maupun proses pelaksanaan program rumah layak huni. Saran penelitian adalah pihak yang terkait yang terdiri dari aparat kelurahan,kecamatan,dan dinas perumahan dan kawasan permukiman kota Gorontalo untuk lebih meningkatkan koordinasi dan evaluasi secara intensif dalam hal penentuan masyarakat penerima program rumah layak huni agar diterima oleh yang memang benar-benar berhak untuk menerima program ini.

Kata Kunci : Fungsi Pengendalian, Program Rumah Layak Huni

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang begitu kompleks, hal ini dikarenakan ketidakmampuan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Selain itu, kemiskinan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi program utama disetiap pemerintahan. Layaknya menjadi fokus utama, pemerintah melakukan berbagai macam upaya dalam menekan angka kemiskinan yang ada. Intervensi melalui kebijakan dilakukan secara bervariasi, baik berupa bantuan langsung secara tunai, bantuan fisik berupa barang, serta melalui pemberdayaan masyarakat. Bantuan-bantuan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat mempengaruhi atau mengganggu tingkat kesejahteraan hidupnya.

Salah satu penyebabnya adalah karena pendapatan tidak tetap, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat miskin, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasar, artinya mereka memiliki rumah tidak layak huni.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan social. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara social dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Perumahan dan pemukiman, selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan persemaian budaya atau sistim nilai. Salah satu wujud kesejahteraan masyarakat dapat ditandai dengan meningkat-nya kualitas kehidupan yang layak.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tridaya yaitu pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga pendekatan ini diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman mereka. Pengendalian merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan

organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi Pengendalian atau controlling ini juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya.

Menurut Robert dalam Siswanto (2012 : 139) Pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara – negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah golongan pemerintah saja, akan tetapi hal juga ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Beberapa kendala dihadapi dalam melaksanakan program-program yang pernah diluncurkan tersebut, belum tersedianya data perumahan dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat miskin

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi keluarga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan tridaya yaitu pendayagunaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga pendekatan ini diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman mereka. Dalam menentukan penerima Rumah Layak Huni tersebut, calon-calon penerima harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin.

Berdasarkan data bahwa jumlah Rumah Layak Huni yang terbangun yaitu 39 Unit sedangkan Rumah Layak Huni Belum terbangun 105 Unit. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan rumah layak huni, diantaranya kurangnya pemerataan penerima di tiap kelurahan, kurang jelasnya aturan dan prosedur penerima bantuan, sehingga membuat polemik dikalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan dasar dilaksanakannya penelitian tentang fungsi pengendalian penerima program rumah layak huni di Kecamatan Kota Timur.

Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimanakah Fungsi Pengendalian Penerima Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Kota Timur?”

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pengendalian

Menurut Mulyadi dan Setiawan (2001:3) mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut.

Menurut Robert dalam Siswanto (2012 : 139) Pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan. terdapat empat langkah dalam pengendalian yaitu sebagai berikut : 1) menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja (*establish standard and methods for measuring performance*) 2) mengukur kinerja (*measure the performance*) 3) membandingkan kinerja sesuai dengan standar (*compare the performance match with the standar*) 4) mengambil tindakan perbaikan (*take corrective action*).

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2014: 242) pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Bahkan Menurut Karyoto (2015 :6) Pengendalian adalah fungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan – kesalahan dalam kegiatan. Kesalahan – kesalahan, seperti salah cara kerja atau salah menggunakan waktu, pasti akan muncul karena suatu kegiatan ditangani oleh banyak pekerja. Kesalahan-kesalahan itu tentu akan memengaruhi hasil yang dicapai. Apabila banyak produk yang dihasilkan cacat, seperti cacat jumlah, kualitas, dan kuantitas, organisasi pasti kecewa; langkahnya untuk mencapai tujuan akan terhambat.

Jenis-jenis Pengendalian

Menurut siswanto (2012 :143) Terdapat beberapa klasifikasi pengendalian yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Klasifikasi tersebut bisa dilihat dari sistem maupun waktu pelaksanaannya. Ditinjau dari sistem pelaksanaannya, pengendalian dapat diklasifikasi menjadi sistem pengendalian umpan balik, pengendalian umpan maju, dan pengendalian pencegahan.

1) Sistem Pengendalian Umpan Balik

Sistem pengendalian umpan balik beroperasi dengan pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan dan perbaikan proses apabila ukuran menunjukkan bahwa proses menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

2) Sistem Pengendalian Umpan Maju

Salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan suatu penyimpangan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti

3) Sistem Pengendalian Pencegahan

Dua sistem pengendalian yang telah dideskripsikan diatas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian umpan maju, berfungsi secara

ekstern terhadap proses yang sedang dikendalikan, memantau operasi, dan terlihat dalam mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Sebaliknya, sistem pengendalian pencegahan adalah kebijakan dan prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses tersebut, pengendalian pencegahan merupakan pengendalian intern organisasi.

Elemen Pengendalian

Menurut Siswanto (2012 :143) Dalam setiap pengendalian, terdapat empat elemen pokok yang satu sama lain berlangsung dalam urutan yang kronologis dan kontinu serta keempat elemen pokok tersebut berhubungan. Keempat elemen pokok pengendalian yang dimaksud adalah:

1. Kondisi atau karakteristik yang dikendalikan;
2. Instrumen atau metode sensor untuk mengukur kondisi atau karakteristik yang dikendalikan;
3. Kelompok, unit, atau instrumen kendali yang akan membandingkan data yang diukur dengan pekerjaan yang direncanakan dan mengarahkan mekanisme perbaikan untuk memenuhi kebutuhan;
4. Kelompok atau mekanisme yang bergerak dan mampu mengadakan inovasi dalam sistem operasi.

Pengertian Pengawasan

Menurut Terry dan Leslie (Paramitha Putri Prisilia,2015:15) berpendapat bahwa Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manager waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.

Menurut Suriansyah (2014 : 2) Bahwasanya di dalam manajemen, atau pengelolaan manajemen itu ada sejumlah fungsi. Diantara Fungsi Penting dari manajemen adalah fungsi perencanaan, pengelolaan dan evaluasi beserta dengan pengawasannya. Jadi dsri sejumlah fungsi manajemen yang meliputi hal tersebut, pengawasan merupakan salah satu fungsi sangat penting dalam pencapaian tujuan dari masalah yang di-manaj itu.

Menurut Sule dan saefullah (Hani, 2016:14) mendefinisikan bahwa pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Pentingnya Pengawasan

Menurut Siswanto (2009 : 200) Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, yaitu :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.

3. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memsani barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
4. Kebutuhan Manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahannya telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan, tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Pengertian Masyarakat

Menurut Comte dalam Syani (2012: 31) “masyarakat merupakan kelompok kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dengan berkembang menurut pola perkembangannya tersendiri”.

Menurut Salam (Hani, 2016:40) mengungkapkan bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin dalam Syani (2012:32), “masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan persatuan yang sama”.

Menurut Soekanto (2012: 32), ciri-ciri dari masyarakat yaitu:

- 1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama
- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyaluran bantuan rumah layak huni ini bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran papan. Disamping itu, program ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan papan bagi masyarakat miskin yang sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran papan. Dan untuk Hal ini searah dengan SOP yang dilakukan oleh pemerintah yaitu: 1) Mengajukan Proposal/ permohonan Rumah Layak Huni kepada Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo, 2) Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo akan memeriksa dan menindaklanjuti permohonan/proposal tersebut, kalau sudah sesuai maka Kantor Dinas akan mensurvei, 3) menentukan daftar nama penerima program RLH, 4) Tim pelaksana program RLH dari Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo memberikan penjelasan kepada penerima tentang pemanfaatan dana bantuan RLH dan penjelasan tata cara pemanfaatan dana bantuan RLH, 5) Melengkapi berkas pencairan dana bantuan

RLH, 6) Memeriksa dokumen Pencairan, 7) mentransfer dana bantuan kepada kecamatan, 8) kecamatan mencairkan dana bantuan kepada penerima.

Melalui program bantuan rumah layak huni tersebut pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa uang untuk pembelian material bangunan guna memperbaiki rumah atau melengkapai kebutuhan papan. maksud adanya Program bantuan Rumah Layak Huni adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni. Tujuan dari adanya Program ini yaitu (1) meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik, (2) memberikan tempat tinggal yang layak dan (3) memberikan kehidupan yang layak, hidup bersih dan sehat.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (2005:59) dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, penyediaan sarana air bersih pada pemukiman rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh, dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan, kredit pemilikan rumah/KPR bersubsidi, maupun pengembangan perumahan swadaya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada Kantor Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, Kelurahan Padebuolo dan Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo diperoleh:

Menurut Robert (dalam Siswanto 2012 : 139) indikator dari pengendalian yaitu Menetapkan standar dan Metode untuk pengukuran kinerja (*establish standard and methods for measuring performance*), Mengukur Kinerja (*measure the performance*), Membandingkan Kinerja Sesuai dengan Standar (*compare the performance mance match with the standar*), dan Mengambil Tindakan Perbaikan (*take corrective action*). Secara deskriptif analisisnya diuraikan sebagai berikut :

1. Menetapkan standar dan Metode untuk pengukuran kinerja

Menetapkan standar dan metode untuk pengukur kinerja sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan program RLH ini, akan tetapi terdapat beberapa masyarakat yang sudah mendapatkan dan belum mendapatkan program ini, salah satu dari enam masyarakat yang telah menerima program RLH tidak sesuai dengan kriteria Umum BAPEMAS, dia hanya termasuk dalam kriteria khusus yaitu rekomendasi dari aparat desa, sedangkan masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan belum mendapatkan program RLH ini.

Untuk masyarakat yang belum mendapatkan program RLH ini berjumlah 105 , dengan keterbatasan waktu peneliti hanya dapat mewawancarai 17 perwakilan dari masyarakat yang belum mendapatkan program RLH. Dari hasil wawancara 17 masyarakat yang belum menerima program RLH ini karena belum sesuai dengan kriteria umum berdasarkan BAPEMAS dan kriteria khusus yaitu dengan masalah bahwa masyarakat yang belum mendapatkan program RLH itu karena mereka belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu mereka telah menerima bantuan pemerintah yang lain seperti bantuan Pembangunan MCK gratis dan Bantuan Kredit Usaha Rakyat(KUR), sedangkan pada peraturan penerima bantuan tidak bisa mendapatkan lebih dari 1 bantuan dalam setahun, ada juga karena rumah mereka masih termasuk rumah bersama (budel).

2. Mengukur Kinerja

Mengukur kinerja juga sangat penting untuk mengetahui apakah tepat sasaran atau tidak penerima program RLH dan bisa mengetahui bagaimana

proses pengukuran kinerja dalam program RLH ini. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan dijelaskan bahwa penetapan penerima RLH dilihat berdasarkan kriteria yang sesuai dari BAPEMAS, selanjutnya Dinas melakukan survei kepada calon-calon penerima dan menentukan siapa saja yang pantas menerima bantuan RLH. Survei dilakukan agar bantuan RLH benar-benar di dapatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja dalam melaksanakan program bantuan tersebut, pemerintah menetapkan indikator. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo menggunakan lima indikator yang kinerja yang umum digunakan yaitu indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Sisi masukan bertalian dengan dana, sumber daya, data, dan informasi serta kebijakan. Sementara itu, dari segi keluaran berhubungan dengan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan. Dari sisi hasil merupakan cerminan berfungsinya keluaran kegiatan. Pada aspek manfaat terkait dengan tujuan akhir pelaksanaan kegiatan dan dampak menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, pada setiap tingkatan indikator.

3. Mengambil Tindakan Perbaikan

Dengan mengambil tindakan ini sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana pelaporan dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan tentang yang terjadi dilapangan sudah terlaksana dengan baik atau tidak, dan bagaimana bentuk penilaian dari kecamatan untuk Kelurahan dan Dinas. Untuk pelaporan Kelurahan sudah bagus dan baik karena kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan ini sudah menyelesaikan tugas yang diperintahkan kecamatan untuk memverifikasi kembali data rumah tidak layak huni untuk menjadi calon penerima bantuan program RLH dan itu sudah dilaksanakan dengan baik. Kalau Bentuk penilaian dari Kecamatan untuk Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo pasti sangatlah bagus, karena dengan adanya program ini dari Dinas sudah banyak membantu untuk menanggulangi jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Kota Timur maupun di Kecamatan yang lainnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis melalui tulisan ini mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Program Rumah Layak Huni sudah berjalan lancar akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan program RLH ini,ada masyarakat yang sudah menerima tapi tidak sesuai dengan kriteria Umum BAPEMAS, masyarakat itu hanya termasuk dalam kriteria khusus yaitu rekomendasi dari aparat desa. Sedangkan pada data masyarakat yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni ada yang lebih membutuhkan bantuan Program RLH ini.
- 2) Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima-penerima RLH sudah tepat sasaran karena sudah melewati survei dari Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan proses pengukuran kinerja program menggunakan lima indikator kinerja yang umum digunakan, yaitu indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).
- 3) Dengan Pelaporan tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk Kantor Dinas kita dapat melihat bagaimana pelaksanaan yang terjadi dalam mencari dan menentukan

penerima program RLH dan dengan bentuk penilaian dari kecamatan untuk kelurahan dan kecamatan sudah baik, dalam penilaian ini kita dapat melihat juga bagaimana cara kerja pelaksana penerima Program RLH.

Dengan Pelaporan tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk Kantor Dinas kita dapat melihat bagaimana pelaksanaan yang terjadi dalam mencari dan menentukan penerima program RLH dan dengan bentuk penilaian dari kecamatan untuk kelurahan dan kecamatan sudah baik, dalam penilaian ini kita dapat melihat juga bagaimana cara kerja pelaksana penerima Program Rumah Layak Huni.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi aparat Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman, aparat Kecamatan, dan Aparat Desa dalam menentukan penerima bantuan program Rumah Layak Huni.
- 2) Pelaksanaan pengawasan program dilaksanakan dari awal kegiatan untuk meminimalisir kesalahan.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih terlibat dalam program ini dengan mengadakan sosialisasi secara kontinyu, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : BUMI AKSARA
- Karyoto, 2015. *Dasar-dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: AndiKomite Penanggulangan Kemiskinan.2005
- Mulyadi dan Johny Setiawan, 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Paramitha, Putri Prissilia. 2015. *Evaluasi Kinerja Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga. Jurnal*. Diponegoro : Universitas Diponegoro
- Peraturan Pemerintah UU No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen, Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*. Edisi 2. Indeks.